

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal. Di lapangan masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, belum meratanya penerapan sistem pemilahan dan pengolahan sampah, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan di tingkat operasional. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Ditinjau dari perspektif Good Environmental Governance, upaya penerapan prinsip partisipasi masyarakat telah mulai terlihat melalui program berbasis komunitas, namun prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum masih perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, kurangnya sosialisasi, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum maksimal, maka pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat aspek implementatif perda tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, memperjelas pembagian kewenangan antar instansi terkait, serta menambah dukungan

sumber daya, baik anggaran maupun fasilitas pendukung pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perda perlu dilakukan secara berkala agar hambatan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindak lanjuti. Kepada perangkat daerah dan aparat pelaksana, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam menjalankan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2024 agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan daerah. Sementara itu, kepada tokoh masyarakat, lembaga adat, dan pihak swasta, disarankan untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi, pengawasan sosial, serta dukungan program lingkungan hidup, sehingga implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Bagi masyarakat di wilayah kabupaten lima puluh kota
2. Membuang sampah pada tempatnya
3. Mampu untuk memilah dan mengelola sampah organik dan non-organik.
4. Mampu untuk menghasilkan devisa atau pendapatan daerah dari organik dan non-organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abi Ishaq. t.t. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra : Mesir.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Bell, Stuart., McGillivray, Donald., dkk. 2013. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Bank Dunia. 2021. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington DC: World Bank.
- Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota. 2024. *Evaluasi Ekonomi Pengelolaan Sampah 3R di Sektor Informal*. Lima Puluh Kota: Bappeda laporan.
- Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota. 2024. *Evaluasi Tantangan dan Rekomendasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Lima Puluh Kota: BappedaLaporan.
- Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota. 2024. *Evaluasi Dampak Ekonomi Pengelolaan Sampah 3R*. Lima Puluh Kota: Bappeda.
- Danusaputro, Munadjad. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Jakarta: Binacipta.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company, 1983.
- Pujirahayu, 2020:126
- Rosita, Candrakirana. 2015. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3): 581–601.

- Salim, Emil. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES.
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- stuart bell *Evironmenta law* ,Oxford;Oxford Univercy Press,hlm 7
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Suryani, Anisa Sri. 2014. "Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Aspirasi*, 5(1) hal 71
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Universitas Andalas. 2023. *Studi Dampak Ekonomi Sistem 3R di Sektor Informal: Kasus Kabupaten Lima Puluh Kota*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Universitas Andalas. 2023. *Studi Evaluasi Tantangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Padang: Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Universitas Andalas. 2023. *Studi Evaluasi Efektivitas Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Padang: Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.
- Wilson, D. C., et al. "Comparative Analysis of Solid Waste Management in 20 Cities." *Waste Management & Research* 2012

Wahdatunnisa , Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 2019 5(2), hal 123–138

Wahyu Mulyadi, 2015:50

Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul *Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret

West R ichard *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, Jakarta : Salemba Humanika, 2008, 49

Widodo Syahida, 2014:10

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Daerah kabupaten lima puluh kota nomor 46 tahun 2017 .

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2018 tentang *Tata Kelola Penyelenggaraan e-Government Di Lingkungan*

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. (Regulasi yang menjadi dasar kebijakan, digunakan untuk menganalisis kekurangan dalam sanksi dan pengawasan.)

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. (Regulasi lokal yang mendukung program pemilahan dan insentif, digunakan sebagai dasar implementasi.)

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

WBSITE

<http://m.antaranews.com/berita/41728/prod>

ukxi-sampah-plastikindonesia-

<https://www.antaranews.com/>

<https://mata-publiknusantara.com/>

<https://eprints2.undip.ac.id/>

<https://dlh.limapuluhkotakab.go.id>

[http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaansampahterpadu.h
tml](http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaansampahterpadu.html)

<https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103714>

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>

<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4743.193-198>

<https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.29>

<https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1117>

<https://doi.org/10.62379/chv6dn09>

<https://ejournal.uit-liboyo.ac.id>

<https://ejournal.uit-liboyo.ac.id>